# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia-Pasifk memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konﬂik antar negara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antar negara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Selain itu, dalam tiga dasawarsa terakhir isu terorisme semakin menguat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah ekonomi dan paham radikal.[[1]](#footnote-2)

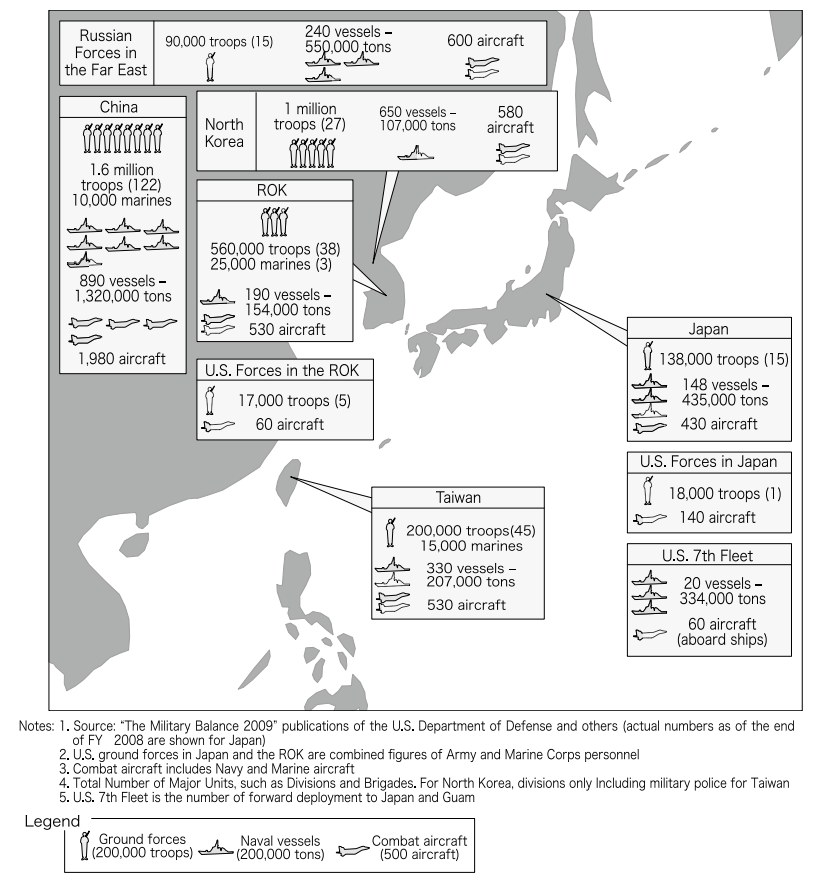
Sehingga dalam penelitian ini Indonesia sebagai negara yang berada dalam kawasana Asia-Pasifik harus melihat kondisi perkembangan kawasan Asia-Pasifik. Seperti pendapat para kaum realisme bahwasnya negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, untuk itu negara menciptakan apa yang disebut oleh kaum realist sebagai “*self-help”* dalam menciptakan keamanan di negaranya

Banyak negara di wilayah ini telah mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi untuk memperluas dan memodernisasi kekuatan militer mereka dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan memperkenalkan sistem senjata baru.

Menurut Kenneth N. Waltzdalam tulisannya “*the origins of war in neorealis theory”* bahwasannya Neorealisme berpendapat bahwa politik internasional dapat dipahami hanya jika efek dari struktur ditambahkan ke tingkat satuan penjelasan tradisional realisme. Dengan menekankan bagaimana struktur mempengaruhi tindakan dan hasil, neorealism menolak asumsi bahwa manusia bawaan nafsu untuk kekuasaan merupakan penyebab cukup perang dalam ketiadaan lainnya. Itu mengandung hubungan kausal antara unit berinteraksi dan hasil internasional.[[2]](#footnote-3)

Lebih lanjut Waltz menyatakan *“Some states may hunger for power for power's sake. Neorealist theory, however, shows that it is not necessary to assume an innate lust for power in order to account for the sometimes fierce competition that marks the international arena. In an anarchic domain, a state of war exists if all parties lust for power. But so too will a state of war exist if all states seek only to ensure their own safety”[[3]](#footnote-4)*

Berdasarkan peta perimbangan kekuatan militer kawasan Asia Pasifik dari  
*Defense of Japan* tahun 2009, penguasaan kekuatan militer secara signifikan oleh  
suatu negara menjadi suatu potensi ancaman ketika negara-negara lain di kawasan  
tidak cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan negara tersebut. Negara-negara di kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang sangat berkembangan kekuatan militernya (lihat Gambar 1). Hal ini yang seharusnya membuat Indonesia melihat kondisi tersebut sebagai sebuah ancaman tradisional sehingga Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai *Security Actor* yang rasional.

**Gambar 1: Peta perimbangan kekuatan militer kasawan Asia-Pasifik**

Sumber: Defense of Japan 2009 Publication (http://www.mod.go.jp/e/publ/w\_paper/pdf/2009/04Part1\_Overview.pdf)

Republik Indonesia disingkat RI adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.[[4]](#footnote-5)

Dengan populasi pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Pada pemilihan Presiden tahun 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak dilahirkan hingga menjadi seorang walikota, Jokowi masih berdomisili di Surakarta sehingga dapat dilihat bahwa Jokowi menganut nilai-nilai Jawa. Jokowi juga mempunyai kemampuan promosi yang baik. Kemampuan tersebut akan mendorong pelaksanaan implementasi kebijakan poros maritim dan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Jokowi juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam pendekatan yang digunakannya ketika menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jakarta. Bahkan, Jokowi disebut sebagai pemimpin yang ‘merakyat.’ Dalam visi dan misi Jokowi, yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mendaftarkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, orientasi pembangunan menekankan pada kesejahteraan rakyat.

Presiden Joko Widodo sudah membuat 9 program unggulan (NAWA CITA) yaitu:[[5]](#footnote-6)

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya.
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya.
5. meningkatkan kualitas hidup manusia.
6. meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekomoni domestik.
8. melakukan revolusi karakter bangsa.
9. memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan berorientasi pada nawa cita tersebut pastilah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI sekarang harus mampu untuk mewujudkanya.

Poros maritim menjadi trending pembahasan setelah dalam debat calon Presiden (Capres) RI tahap ke-3 dengan tema politik internasional dan ketahanan nasional, jokowi mencetuskan konsep Politik Luar Negerinya (Polugri) yaitu Poros Maritim Dunia, hal ini dipertegas dalam debat lanjutan tim sukses capres dimana Andi Widjianto sebagai perwakilan dari kubu Jokowi-Kalla bahwasannya dokrin Polugri jokowi adalah poros maritim menggantikan dokrin Polugri susilo bambang yudhoyono yaitu *thousand friends, zero enemy.*

Pengakomodasian janji politik Presiden kedalam dokumen *Grand Strategy* merupakan salah satu bentuk praktek ketatanegaraan yang lumrah dilakukan di negara-negara demokratis. Maka dari itu, pembahasan konsep Poros Maritim Dunia dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dapat dipahami sebagai legitimasi visi Presiden terpilih dalam memimpin negara dan pemerintahan selama lima tahun masa kepemimpinannya. Dalam dokumen tersebut, konsep Poros Maritim Dunia yang terkandung dalam visi Presiden terpilih ditempatkan sebagai sebuah doktrin nasional, yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi politik luar negeri sebagai berikut: “Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio”.[[6]](#footnote-7)

Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Poros maritim digadang-gadang merupakan sebuah konsep kebijakan atau doktrin Polugri Presiden Joko Widodo, yang sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga nantinya dengan kebijakan ini diharapkan Indonesia mampu menjadi sebuah kekuatan baru di Indonesia.

Poros maritim menjadi sebuah fenomena baru di Indonesia dimana biasanya paradigma yang dibangun oleh pemerintah adalah negara terfokus pada sektor agraris namun kali ini beralih ke sektor maritim. Langkah ini bukan tanpa sebab melihat Indonesia sebagai negara ke-2 dengan garis pantai terpanjang didunia sudah seharusnya Indonesia lebih fokus untuk pembangunan berbasis kemaritiman.

Sebagai Negara bahari, Indonesia tidak hanya memiliki satu laut utama atau *heart of sea* tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai *sea system* yaitu laut jawa jawa, flores dan laut banda,. Laut jawa merupakan kawasan jantung perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa barat bahkan houben menyatakan bahwa laut jawa bukan hanya merupakan laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti bagi kawasan asia tenggara.[[7]](#footnote-8)

Berbicara tentang potensi-potensi laut sudah seharusnya Indonesia serius dalam menjaga keamanan maritimnya sehingga nantinya akan menciptakan sebuah rasa percaya kepada pihak asing untuk melakukan interaksi di wilayah maritim Indonesia sehingga akan berimplikasi ke perekonomian Indonesia. Ketiadaan dari cetak biru poros maritim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini menjadi sebuah ambiguitas.

Kondisi kemaritiman Indonesia sekarang secara bertahap sudah mulai berbenah ini bisa dilihat dari arah kebijakan Indonesia yang selalu berorientasi kepada kebijakan maritim (*maritim policy).*

Adapun masalah krusial sektor maritim adalah masih rendahnya pengamanan laut Indonesia untuk tetap menjaga potensi-potensi kelautan Indonesia hal. Sehingga dibutuhkan sebuah komitmen dari pemerintahan untuk tetap focus menggali potensi-potensi kemaritiman Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.Kebijakan Umum Pertahanan Negara meliputi segalaupaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara meliputi Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara, Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara, Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran, dan Kebijakan Pengawasan.[[8]](#footnote-9)

Melihat kebijakan umum terkait pertahanan negara sebenarnya Indonesia sudah memiliki sebuah landasan untuk membuat sebuah alur kebijakan, langkah selanjutnya adalah dengan menyesesuaikan dengan kebijakan Poros Maritim yang sedang diusung oleh Presiden Jokowi.

Terlepas dari itu semua Indonesia harusnya sudah membuat sebuah langkah-langkah implementasi terhadap sebuah strategi militer sehingga tindakannya dapat terukur. Sudah seharusnya Indonesia membuat sebuah konsep Poros Maritim Dunia sebagai dokrin untuk keamanan maritim jika kita melihat Amerika Serikat alur yang dilakukakan nya oleh negara tersebut dalam membuat sebuah kebijakan maritim adalah sebagai berikut: *National Interest* sebagai *The Fundamental Goal Of The Nation – National Security Strategy – National Defense Strategy – National Military Strategy – National Strategy for Maritim Security– Maritim Strategy – Naval Operations – Naval Tactics*[[9]](#footnote-10), maka dari itu sudah seharusnya Indonesia membuat sebuah alur yang jelas terkait konsep Poros Maritim Dunia yang dibuatnya.

Apabila mempelajari dan membandingkan konsep strategi beberapa negara maritim besar yang telah memiliki tradisi Angkatan Laut yang kuat, seperti Inggris, Amerika Serikat, India dan Jepang, maka akan ditemukan pengertian yang timbal balik antara strategi maritim dan strategi Angkatan Laut. –– penggunaan kata maritim dalam konsep strategi di negara maritim besar sekalipun yang dimaksud adalah kekuatan Angkatan Laut. Asumsinya adalah bahwa kekuatan-kekuatan maritim lainnya yang dalam hal ini adalah kekuatan non militer (sipil), merupakan kekuatan pengganda Angkatan Laut yang akan digunakan manakala negara membutuhkan, misalnya dalam masa krisis atau perang yang tentunya akan diatur dengan ketentuan peraturan tersendiri.[[10]](#footnote-11)

Anggaran militer Indonesia sampai saat ini masih tergabung dalam anggaran di kementerian pertahanan. Adapun total anggaran militer Indonesia di tahun 2015 sebesar 102,3 Triliun dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 99,5 Triliun.[[11]](#footnote-12)

Adapun Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Matra Darat; (2) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut; (3) Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Udara; (4) Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif.[[12]](#footnote-13) Pada tahun 2017 diproyeksikan anggaran untuk kementerian pertahanan mencapai 120 Triliun.

Ada banyak faktor pendorong dan penghambat penguatan militer Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)..Tidak ada pihak yang bisa menafikkan bahwa kebutuhan pertahanan nasional Indonesia sangatlah besar, tetapi daya nasional (existing national power) yang tersedia sangat terbatas, lagi pula anggaran belanjanya belum dipetakan (allocating resources) dengan tepat.

Pada situasi demikian, ada baiknya menoleh keluar kotak (out of the box) mengeksplorasi penggunaan paradigma *Revolution in Military Affairs* (RMA), yang dirancang untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. terdapat tiga komponen RMA yang umumnya, di rekayasa ‘ulang’ untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan situasional dan atau kecenderungan yang berlaku yaitu (1) teknologi, (2) dokrin, (3) manajemen.[[13]](#footnote-14) RMA adalah dimana angkatan bersenjata suatu negara diharapkan dapat mengalami modernisasi dari yang tadinya fokus ke alat-alat berat dan pertempuran tradisional, kini menjadi fokus ke teknologi dan informasi sebagai medan pertempuran baru.[[14]](#footnote-15)

Perkembangan geopolitik dan geostrategi pada tataran global, regional maupun nasional dewasa ini menimbulkan tantangan terhadap pertahanan negara yang semakin dinamis dan kompleks. Sehingga Indonesia harus mampu menciptakan sebua postur pertahanan maritim yang mampu menjaga keamanan maritim dengan mempertimbangkan instrument-instrumen seperti alokasi anggaran, kesejahteraan prajurit, modernisasi alusista serta pengadaan armada alusista baru demi memenuhi unsur *Minimmum Essential Force* ( MEF).

Perkembangan kawasan Asia Pasifk yang sangat dinamis akan berdampak pada masalah ekonomi dan keamanan. Perkembangan yang perlu dicermati dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan adalah kebijakan ekonomi dan militer Tiongkok, kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Perkembangan geopolitik dan geostrategi pada tataran global, regional maupun nasional dewasa ini menimbulkan tantangan terhadap pertahanan negara yang semakin dinamis dan kompleks.[[15]](#footnote-16)

Perlombaan senjata antar negara-negara di kawasan asia pasifik juga menjadi sebuah sinyal bagi Indonesia untuk mampu mengikutinya karna tidak menutup kemungkinan ancaman keamanan tradisional kedepan berasal dari dari actor negara melihat potensi perkembangan kawasan asia pasifik yang semakin memanas.

Menurut Henry Xu Ke, kapabilitas keamanan maritim Indonesia memiliki kekurangan dalan hal Money (budget), Manpower (personnel), Machines (ships), dan Methods (skills and training). Dapat diibaratkan bahwa kekuatan laut bertumpu pada alat dan teknologi yang digunakan. Dalam hal money, Indonesia masih memiliki kelemahan akan terbatasnya anggaran pertahanan[[16]](#footnote-17)

Berdasarkan kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) ada 133 unit dengan yang siap dioperasikan sebesar 50,82%. Untuk kendaraan tempur marinir dari berbagai jenis ada sejumlah 435 unit dengan yang siap dioperasikan hanya 36,09%. Lalu untuk jumlah pesawat terbang yang tersedia sebesar 71 unit dengan yang siap beroperasi sebesar 52%.[[17]](#footnote-18) Kondisi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebagian besar berusia 25-40 tahun menandakan bahwa postur kekuatan TNI masih jauh dari standar. Selain itu, jumlah armada laut Indonesia yang diperkirakan hanya sebesar 45000 personel.[[18]](#footnote-19)

Dalam hal Alutsista juga seharusnya TNI AL melakukan sebuah modernisasi yang hanya berfokus pada proses peremajaan saja namun juga harus melakukan sebuah modernisasi hal fungsi. Perbelanjaan armada alutsista juga harus dilakukan untuk dapat membuat sebuah keamanan maritim yang kuat, melihat kondisi geografis laut Indonesia yang sangat luas seharusnya Indonesia fokus terhadap sistem pertahanan martim.

**Gambar 2: kebutuhan untuk menciptakan pengamanan maritim**

Dalam isu-isu military expenditure (belanja militer), terdapat apa yang disebut Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan istilah untuk menggambarkan proyeksi dan target kebutuhan pemenuhan alutsista dan infrastruktur pertahanan suatu negara. MEF, menurut Purnomo Yusgiantoro mantan Menteri Pertahanan RI 2009-2014, merupakan kebutuhan mendesak yang jika tidak dipenuhi maka taruhannya adalah kedaulatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi pemenuhan kebutuhan kesejahteraan rakyat adalah penting, namun di sisi lain terdapat kebutuhan pula untuk keamanan dan pertahanan yang jika tidak dipenuhi, akan berujung pada semakin besarnya ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.[[19]](#footnote-20)

Perlu disadari bahwanya dalam membangun sebuah postur pertahanan kita harus melihat dari sisi ancaman yang akan terjadi bukan hanya dari dalam tapi juga ancaman dari luar. Dalam *The Secretary-General’s Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility* ancaman internasional didefinisikan sebagai “*defined threats to international security as any event or process that leads to large scale death or lessening of life chances and undermines States as the basic unit of the international system*”[[20]](#footnote-21).

Sehingga perlu diperhatikan bahwa untuk menciptakan sebuah keamanan maritim yang nantinya berhubungan dengan pertahanan laut. Keamanan laut adalah bagian dari pertahanan negara dan pasti berada dalam bingkai keamanan negara . Artinya—strategi keamanan laut nasional harus berada dalam bingkai strategi keamanan nasional, yang titik beratnya adalah pertahanan nasional.

Dalam menciptakan postur pertahanan laut Indonesia juga harus melihat potensi ancaman yang akan tercipta sekarang dan mendatang . Perkembangan ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun non negara, yang bersifat nasional, regional dan internasional.

Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisisosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan prediksi dan prioritasnya maka ancamanancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pertahanan maritim dan berfokus pada institusi TNI AL dalam bentuk skripsi, dengan berjudul : **“STRATEGI KONSEP PEMBANGUNAN POSTUR PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM MENGHADAPI DINAMIKA KEAMANAN MARITIM INTERNASIONAL, STUDI KASUS; PENGUATAN PERAN TNI AL”.**

## Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini peneliti melihat dari kondisi realitas geografi Indonesia yang sangat strategis dengan segala potensi-potensinya terkhusus dalam hal kemaritiman seharusnya Indonesia menjadi sebuah negara kekuatan baru dunia hal ini mengharuskan Indonesia untuk terus menggejot pembangunan maritimnya.

Menciptakan keamanan maritim seperti yang di terangkan latar belakang masalah berarti berbicara bagaimana postur pertahanan yang akan dibangun dalam hal ini seperti yang diterangkan dalam buku putih 2015 Kemenhan postur pertahanan yang dibangun harus sesuai dengan kebijakan yang di bangun pemerintah yakni kebijakan Poros Maritim Dunia.

Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konﬂik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konﬂik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan persengketaan. Namun sebaliknya, konﬂik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konﬂik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan percaya.[[22]](#footnote-23)

Dalam uraian di atas untuk memudahkan dalam menganalisa masalah , penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Poros Maritim Dunia yg sesuai dengan realitas geografi dalam menciptakan kedaulautan maritim Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan ancaman keamanan maritim Internasional serta penangannya?
3. Bagaimana seharusnya Konsep pertahanan maritim yg harus di bangun Indonesia dalam fokusnya sebagai negara Poros Maritim Dunia ?
4. Bagaimana peranan TNI AL dalam menjaga keamanan maritim Indonesia dari ancaman maritim internasional?

### Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Poros Maritim Dunia yang dimaksud adalah sebuah wacana orientasi Politik luar negeri “Bebas Aktif” Indonesia dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
2. Konsep pembangunan pertahanan maritim yang dimaksud adalah sebuah konsep postur pertahanan maritim yang dibuat oleh Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
3. Ancaman keamanan maritim yang dimaksud adalah ancaman militer baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun non negara, yang bersifat nasional, regional dan internasional.
4. Penguatan peran insititusi TNI AL yang dimaksud adalah unsur-unsur seperti anggaran, SDM dan Alusista serta peran yang dilakukan oleh TNI AL menjaga kedaulatan maritim Indonesia

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah di ajukan untuk memudahkan menganalisa mengenai permasalahan yang di dasarkan pada identifikasi masalah, maka penulis akan menarik research question dari permasalahan tersebut sebagai berikut : **Bagaimana konsep postur pertahanan maritim dalam menghadapi ancaman keamanan maritim Internasional serta implementasi peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dari ancaman maritim Internasional?**

## Tujuan dan Keguanaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

* 1. Mengetahui Konsep Poros Maritim Dunia yang Indonesia buat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
  2. Menggambarkan dinamika perkembangan keamanan maritim Internasional.
  3. Mengetahui model pembangunan postur pertahanan maritim yang akan dibuat oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim Internasional.
  4. Mengetahui kondisi institusi TNI AL perihal perihal pertahanan maritim dan keamanan maritim.
  5. Menambah khazanah pengetahuan terkait postur pertahanan maritim dan keamanan maritim.

### Kegunaan Penelitian

* + - 1. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai postur pertahanan maritim dan peranan TNI AL dalam menciptakan keamanan maritim.
      2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian kepada keamanan Indonesia dan institusi TNI AL.
      3. Menjadi bahan masukan untuk Indonesia sebagai referensi dalam membangun postur pertahanan maritim dalam kaitannya dengan TNI AL.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan kerangka berpikir yang dapat dijadikan landasan teori, pendapat dari para pakar yang berhubungan dengan variable yang menjadi kajian dalam melaksanakan penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti akan membahas variable penelitian berdasarkan teori Realisme. Teori realisme menempatkan negara sebagai aktor utama. **Paul R. Viotti dan Mark Kauppi** mengasumsikan realisme ke dalam empat hal penting, yaitu:[[23]](#footnote-24)

1. ***States are the principal or most important actors*. Negara direpresentasikan sebagai kunci dari unit analisis.**
2. ***The state is viewed as unitary actor*. Negara menerapkan satu kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang berbeda.**
3. ***The state is essentially a rational actor*. Negara merupakan aktor paling rasional yang bertindak untuk dirinya sendiri.**
4. ***Within the hierarchy of international issue, national security usually tops the list*. Keamanan nasional yang dikaitkan dengan Negara menekankan bahwa keamanan dipandang sangat penting. Hal ini juga menandakan akan pentingnya kekuatan (*power*).**

Negara sebagai fokus dalam studi Hubungan Internasional perannya. Sejalan dengan hal konsep keamanan juga mengacu pada berbagai interaksi antar aktor yang terjadi didalamnya.[[24]](#footnote-25) **Meneurut Christian Reus-Smit** :

**Negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan independen merupakan unit analisis yang menjadi fokus bagi realisme. Aktor-aktor lain hanyalah bersifat sekunder, karena dinamika politik internasional, terutama keamanan, sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa negara tidak segan untuk menggunakan kekuatan militernya jika merasa terancam. Selain itu, realisme berpendapat bahwa kerja sama internasional hanya dapat berlangsung dibawah keadaan yang hegemon, ketika negara yang dominan menggunakan kekuasaannya dalam membuat dan menyelenggarakan peraturan untuk meningkatkan kerja sama di antara negara-negara.[[25]](#footnote-26)**

Negara dalam hal ini merupakan aktor dalam hubungan internasional yang sangat rasional dalam bertindak dan menentukan arah gerak nya melalui sebuah kebijakan. Hal ini dikarnakan negara lah yng bertanggung jawab atas keamanan negaranya untuk menciptakan keamanan negara melalui power yang dimiliki negara tersebut.

Konsep tentang politik luar negeri sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya adalah **Mappa Nasrun** yang memberikan konsep tentang kebijakan luar negeri, yaitu:

“**Kebijakan luar negeri suatu negara pada hakekatnya merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan dalam negerinya, juga keadaan dan perkembangan sistem politik internasional dapat menjadi faktor yang turut menentukan perilaku kebijakan luar negeri. Jadi, kebijakan luar negeri pada pokoknya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.[[26]](#footnote-27)**

Perkembangan issu keamanan dalam hubungan internasional tidak terlepas dari keamanan dari sigi tradisional yakni terkait persolaan militeristik*,* dalam buku *Security: A New Framework Of Analysis,* oleh **Barry Buzan Ole, Weaver dan Jaap de Wilde** terkait kemanan adalah:

***Security is about survival. It is when an issue is presented as posing an existential threat to a designated referent object (traditionally, but not necessarily, the state, incorporating government, territory, and society). The special nature of security threats justifies the use of exraordinary measures to handle them. The invocation of security has been the key to legitimazing the use of force, but more generally it has opened the way for the state to mobilize, or to take special power, to handle existential threats. Traditionally, by saying “seciruty:, a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development[[27]](#footnote-28)***

Sehingga dalam studi keamanan lebih lanjut dalam buku tersebut mengatakan Di dalam study keamanan terdapat 5 sektor yang bisa terjadi dalam sekuritisasi. (1) Military, (2) Political, (3) Economic,(4) Society,(1) Environment.[[28]](#footnote-29)

Dalam hal negara menciptakan sebuah keamanan pastilah akan terdapat peran politik hal ini lah nantinya yang menyebab kan apa apakah suatu isu di anggap sebagai ancaman ataupun tidak, serta terkait anggaran, grand strategy militer juga ada unsur actor politik didalamnya.

Sehingga dalam melihat konteks keamanan titik fokus dalam penelitian ini adalah pada sektor militer dan serta akan lebih menggunakan landscape keamanan menurut Indonesia sebagai “*Security Actor*” yang akan perimplikasi terhadap sebuah kebijakan untuk mengatasi keamanan serta konsep pertahanan yang akan dibuat sebagai sebuah polarisasi dalam securitisasi.

Dalam menciptakan sebuah postur pertahanan maritim Indonesia sendiri memaknai keamanan maritim sebagai:

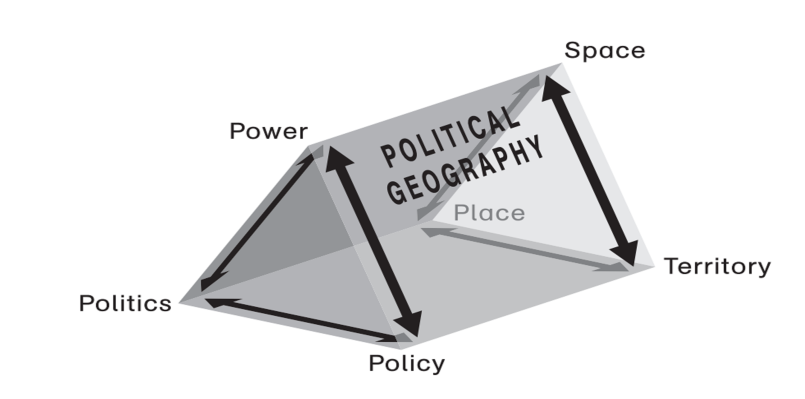
**Peningkatan keamanan maritim dilakukan dengan menggelar kekuatan laut yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil terluar/terdepan,dan secara efektif mampu menjaga kedaulatanwilayah laut yurisdiksi nasional serta diarahkanuntuk mampu memantau keamanan wilayahSamudera Pasifk dan Hindia. Peningkatankeamanan wilayah daratan, perbatasan darat Negara, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan dilakukan melalui gelar kekuatan darat yang efektif dalam pemberdayaan wilayah.[[29]](#footnote-30)**

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam membangun sebuah postur pertahanan bakal secara khusus Indonesia akan berfokus pada pembangunan pertahanan maritim hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden terkait Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, seperti yang di terangkan dalam latar belakang terkait fokus maritim. Lebih lanjut, sesuai Pidato di East Asian Summit tahun 2014, Presiden menyampaikan 5 (lima) pilar Pembangunan Poros Maritim yang mencakup:

1. **Membangun budaya maritim;**
2. **Menjaga dan mengelola sumberdaya laut;**
3. **Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;**
4. **Memperkuat diplomasi maritim**
5. **Sebagai Negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia wajib membangun kekuatan pertahanan maritim.[[30]](#footnote-31)**

Dalam hal konsepsi Poros Maritim Dunia peneliti akan menggunakan analisis geopolitik dan strategi sebagai langkah untuk mengetahui konsep “Poros” yang ideal untuk Indonesia serta pengaruh nya terhadap konsep pertahanan maritim yang akan dirumuskan. Menurut **Martin Jones, Rhys Jones and Michael Woods** geopolitik adalah :

***Political geography as a cluster of work within the social sciences that engages with the multiple intersections of ‘politics’ and ‘geography’, where these two terms are imagined as triangular configurations*. [[31]](#footnote-32)**



**Gambar 3: Geografi politik sebagai interaksi 'politik' dan 'geografi'**

Lebih lanjut dalam buku tersebut menggambarkan Geopolitik dalam sebuah hubungan segitiga konfigurasi antara *Power*, Politics dan Policy.[[32]](#footnote-33)

Indonesia akan mengubah sebuah paradigma pembangunan yang akan berfokus pada pembangunan maritim. Pakar kelautan asal Indonesia **Rokhmin Dahuri** berpendapat:

**Pembangunan kelautan hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang, yakni, (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, (2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil, (3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, (4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan.[[33]](#footnote-34)**

Kajian dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami perkembangan pesat baik dalam perkembangan. Kususnya tentang power, menurut **Kuatilya**, tokoh negarawan india kuno yang menafsirkan tentang *power* yaitu: sebagai “pemilikan kekuatan” (yaitu, suatu atribut) yang berasal dari tiga unsur: pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian[[34]](#footnote-35).

Dalam hal *power* pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ada yang disebut dengan “*sea power”,* menurut **Alfred Thayer Mahan** Dalam membangun sebuah negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut yang besar, menurut Mahan diperlukan 6 (enam) elemen pokok yang akan menjadi modal utama, yaitu:

1. **Letak geografi (*geographical position*),**
2. **Bangun muka bumi, termasuk koneksivitas, produksi alam, dan lingkungan (*physical conformation, as connected therewith, natural productions and climate*),**
3. **Luas wilayah (*extent of territory*),**
4. **Jumlah penduduk (*number of population*)**
5. **Karakter masyarakat (*character of the people*), dan,**
6. **Karakter pemerintahan, termasuk didalamnya institusi national (*character of government, including therein the national institutions* ).[[35]](#footnote-36)**

Bagi bangsa yang memiliki pantai maka laut merupakan perbatasan dan kekuasaan nasionalnya ditentukan oleh kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut. Luas wilayah yang kadang-kadang merupakan kelemahan karena mengurangi keinginan untuk berorientasi ke laut. Jumlah penduduk, penduduk yang suka berdagang atau berniaga mudah, berkembang menjadi bangsa yang memerlukan daerah jajahan untuk melengkapi kebutuhan nasionalnya. Pemerintahan yang mendorong untuk mengembangkan fungsi kelautan.

Sebuah postur pertahanan yang akan di bangun pastilah melihat dari dinamika global serta jenis-jenis ancaman yang bakal mengganggu keamanan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam buku putih pertahanan Indonesia yang di buat oleh **Kemenhan RI** mengatakan:

**Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern.[[36]](#footnote-37)**

Sebuah konsep pertahanan diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial sebuah negara yang melibatkan segala unsur yang ada didalam negara tersebut. Pertahanan teritorial bukan hanya dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika dalam keadaan perang saja namun pertahanan teritorial digunakan sebagai pelindung sebuah negara dari segala ancaman yang datang. Dalam bukunya **Adam Roberts** mendifinisikan *territorial defence* sebagai berikut:

***Territorial defence is a system of in depth, it is the governmentally organized defence of state’s own territory, conducted on its own territoty. It is aimed at creating a situation in which an invade, even though he may at least for a time gain geographical possession of part or all the territoru, is constantly harassed and attacked from all sides. It is a form of defence strategy which has important organizational implications, being liable to involve substansial reliance on citizen army, including local units of a militia type. Characteristically, a territorial defence system is based on weapons system, strategies and methods of military organization which are better suited to their defensice role than ti engagement in major militaru actions abroad.[[37]](#footnote-38)***(petahanan wilayah adalah suatu sistem pertahanan yang mendalam yang di susun oleh pemerintah suatu negara di wilayah teritorialnya yang diselenggarakan di wilayahnya sendiri, dengan tujuan menciptakan kondisi kondusif antara pemerintahan sipil dan militer dan melibatkan sebagian atau selutuh teritorialnya atau paetisipasi rakyat dan sumber daya alam dalam menghadapi musuh dari segala penjuru. Teritorial defence merupakan suatu bentuk strategi pertahanan yang mempunyai organisasi pertahanan yang baik yang melibatkan masyarakat sebagai unsur cadangan. Karakteristik territorial defence berdasarkan sistem persejantaan, stategi dan metode organisasi militer, hal ini meruoajan suatu sistem pertahanan yang integrak melibatkan seluruh lapisan warga negara dan wilayahnya daru pada hanya berperang atau berekpansi ke negara lain.)

Studi kasus yang akan peneliti angkat adalah tentang penguatan institusi TNI AL. sehingga dalam kaitanya dengan pembangunan postur pertahanan maritim pastilah TNI menjadi sebagai garda terdepan untuk menciptakan kemanan maritim.

Adapun tugas utama dari TNI AL berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, angkatan laut bertugas sbb:

1. **Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.**
2. **Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang terlah diratifikasi.**
3. **Melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.**
4. **Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.**
5. **Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.**

Dalam menciptakan sebuah keamanan laut TNI AL yang nantinya bakal berhubungan dengan postur pertahanan maritim, peneliti disini menggunakan sebuah metode analisis RMA untuk menganalisis institusi RMA. Fokus analisis dari RMA seperti yang diterangkan di latar belakang masalah yakni Teknologi, Dokrin, dan Manajemen. menurut **Andi Wijayanto[[38]](#footnote-39)** untuk pemenuhan RMA dapat ditinjau dari beberapa faktor utama yaitu:

1. **Kemampuan untuk memperoleh informasi dan intelijen strategis untuk mendukung rencana strategi.**
2. **Kemampuan gelar pasukan yang terkoordinasi dan dilengkapi dengan sarana prasarana mobilitas dan logistik.**
3. **kapabilitas dukungan tempur yang ditentukan oleh penggunaan teknologi digital untuk mempercepat dan mengintegrasikan sistem logistik didaerah pertempuran.**
4. **kapabilitas manuver, sebagai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan menyerang, penggelaran pasukan dan penerobosan.**
5. **kapabilitas mobilitas pasukan, yang didukung oleh kesamaptaan prajurit dan dukungan alat angkut baik darat, air dan udara. Keenam, kapabilitas tempur pasukan.**

Menurut **Clark G. Reynolds** dalam *Command of The Sea* memberikan tiga panduan dalam mengindentifikasi sekaligus memahami fungsi angkatan laut, yaitu *maritim or ”blue-waters*” *nations*, *continental nations* dan *small nations.[[39]](#footnote-40)* Lebih lanjut Renolds mengatakan ada enam Fungsi angkatan laut pada *maritim nations* (negara maritim) (1) *maintain a superior fighting fleet either*, (2) *defend against invasion, (3) protect maritim commerce, (4) blockade the enemy coast, (5) engage in combined operations, (6)provide strategic bombardment.[[40]](#footnote-41)*

Untuk mampu memciptakan sebuah keamanan maritim maka dalam membentuk sebuah postur pertahanan maritim Indonesia menggunakan konsep *Minimum Essensial Force.* Pemerintah Indonesia sudah meliris konsepan pembangunan MEF yang terbagi menjadi 3 tahap. Menurut **Kemenhan** *Minimum* kekuatan pokok dari Minimum *Essensial Force* adalah

**Kekuatan Pokok (*Minimum Essential Force/MEF*) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.[[41]](#footnote-42)**

Pembangunan MEF TNI tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan postur TNI yang mampu mengatasi 2 (dua) *trouble-spots* secara bersamaan, serta 1 (satu) kekuatan cadangan untuk mengantisipasi munculnya ancaman tambahan.

Dari kerangka pemikiran ini model pembangunan pertahanan maritim Indonesia bahwanya pertahanan maritim yang akan di bangun oleh Indonesia harus haruslah merupakan representasi dari Indonesia baik termasuk didalamnya realitas geopolitik dan geostrategi, sehingga dapat disimpulkan postur pertahanan maritim adalah sebuah bentuk pertahanan maritim yang bertujuan untuk menciptakan keamanan maritim dari berbagai ancaman. Dalam hal ini peneliti mengambil fokus pada peranan intitusi TNI AL. untuk mampu menjalankan tugasnya secara optimal. RMA merupakan sebuah bentuk analisis institusi militer terkait teknologi dalam hal ini terkait alusista, dokrin dalam hal ini terkait acuan dalam membuat sebuah stategi militer, manajemen dalam hal ini terkait persoalan struktur internal TNI AL serta hubungannya dengan struktur pemerintahan. MEF adalah sebagai acuan untuk membuat sebuah postur pertahanan yang efektif efesien terkait sumber daya yang dibutukan TNI AL dalam menciptakan keamanan maritim

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sebuah Pendekatan intermestik yang akan menjembatani antara kebijakan domestic dan internasional. Pendekatan intermestik adalah menjadi jembatan antara pendekatan internasional dan domestik, maka model ini menyintesiskan beberapa model yaitu dengan menggunakan model yang mementingkan peran ide yang bersifat transnasional sebagai proses pertama dan model yang mementingkan faktor kepentingan aktor sebagai proses kedua dalam proses perubahan kebijakan[[42]](#footnote-43).

Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah bentuk pengejawantahan dari Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam hal ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menciptakan sebuah keamanan laut melalui konsep postur pertahanan menggunakan konsep MEF. Serta peran TNI AL yang kurang optimal sehingga diperlukannya sebuah reformulasi terkait institusi tersebut dan ini mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia belum berjalan secara optimal. Dan juga sebagai bentuk perlindungan dari ancaman tradisional dan non tradiosional di laut.

### Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas serta didukung dengan menggunakan teori-teori maupun konsep-konsep sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa :**“Perkembangan dinamika keamanan maritim Internasional mempengaruhi strategi pembangunan postur pertahanan maritim Indonesia sehingga harus adanya penguatan peran TNI AL”.**

### Pengujian Hipotesis dan indikator

Operasionalisasi variabel penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  **(Hipotesis)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **Analisa Data** |
| **Variabel Bebas:**  Perkembangan dinamika keamanan maritim Internasional | 1. Perkembangan Keamanan maritim | 1. Data (fakta dan angka) mengenai dinamika perkembangan keamanan maritim internasional   Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework of Analysis, (London :Lynne Riener Publisher, 1998)   1. Data (fakta dan angka) mengenai ancaman maritim   [The Present Addendum to the Report of the Secretary-General on Oceans and the Law of the Sea A/63/63](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/63) |
| Variable terikat 1:  berdampak pada strategi pembangunan postur pertahanan maritim | 1. Pembangunan Postur Pertahanan Maritim | 1. Data (fakta dan angka) mengenai modul kebijakan poros maritim dunia   Kebijakan terkait pembangunan maritim:   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 2. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 3. 5 pilar poros maritim 4. Data (fakta dan angka) mengenai postur pertahanan martim indoenesia   Kebijakan umum dan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2015-2019 |
| Variable terikat 2  Peran institusi TNI AL dalam menghadapi ancaman maritim Internasional | Penguatan institusi TNI AL | 1. Data (fakta dan angka) mengenai optimalisasi peran TNI AL   the revolution in military affairs  minimum essential force   1. Data (fakta dan angka) mengenai peran TNI AL   UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI   1. Data (fakta dan angka)   Mengenai peran TNI dalam Menciptakan keamanan maritim  Buku putih Pertahanan Militer Indonesia 2015 |

### Skema Kerangka Teoritis

**Dinamika Keamanan Maritim Internasional**

**Postur Pertahanan Maritim**

1. Territorial Defence
2. Minimmum Essential Force

**INDONESIA**

1. Neo Realism
2. Sea power
3. Geopolitik dan Geostrategi

**Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia**

**TNI AL**

1. Revolution in Military Affairs
2. Command of The Sea

**Pendekatan Intermestik**

**Strategi konsep pertahanan maritim untuk menciptakan Keamanan Maritim**

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### Metode Penelitian

Metode merupakan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang materinya **(Nawawi dan Martini dalam Prastowo, 2011)**.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian. Meteode penelitian yang digunakan adalah **Metode penelitian deskriptif** adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. **Metode penelitian historis** yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa suatu fenomena, perkembangan juga peristiwa masa lampau dalam memahami situasi sekarang dan memungkinkan prediksi perkembangannya di masa akan datang.

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif dan historis sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan suatu kondisi dimana postur pertahanan maritim yang dibangun oleh Indonesia merupakan sebuah pengejawantahan dari dinamika perkembangan keamanan maritim Indonesia . Penulis juga menganalisis sejauh mana peran dari intitusi TNI AL sebagai garda terdepan pertahanan negara dalam menciptakan sebuah keamanan maritim.

Teknik analisis data yang gunakan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini berupaya mencari pemahaman *(understanding).* Sehingga dapat mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik studi kepustakaan **(library research)** dengan mengumpulkan data dan informasi berdasarkan literatur atau referensi. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian penulisan atas data-data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, majalah, koran, serta sumber-sumber informasi lainnya termasuk data dari internet yang dapat di pertanggungjawabkan.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

### Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian bertempat di lokasi sebagai berikut :

1. Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung (UNPAS) Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
3. Kementerian Keamanan dan Pertahanan JL. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
4. Institute Defense and Strategy Research, Bandung
5. Perpustakaan HMI Komisariat ISIP Unpas JL. Cilenta dalam 2 No. 25a

### Lamanya Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Oktober 2016 sampai dengan April 2017.

## Sistematika penulisan

Sistem pembahasan penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab. Dari masing-masing bab akan dibagI lagi menjadi beberapa sub-bab dan secara detail akan disajikan sebagai berikut:

**Bab 1 : Pendahuluan**

Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan permusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian serta dilengkapi kerangka teoritis, skema kerangka teori dan hipotesis. Yang dimana kedua kerangka tersebut dilengkapi penjelasan akan operasionalisasi variable dan indikator, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta lokasi dan lama penelitian dan sistematika penulisan

**Bab 2 : Pembahasan Variabel Bebas**

Berisi tentang data-data dan fakta terkait Dinamika perkembangan keamanan maritim Internasional

**Bab 3 : Pembahasan Variabel Terikat**

Berisi data-data dan fakta terkait postur pertahanan maritim dan peran TNI AL dalm menjaga keamanan maritim

**Bab 4 : Pembahasan Analisis**

Berisi tentang analisis atas variable bebas dan terikat dengan menggunakan indikator-indikator variable dengan menggunakan metode dan teknik penelitian

**Bab 5 : kesimpulan**

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

**Daftar Pustaka**

Berisi tentang sumber-sumber referensi penelitian yang digunakan oleh peneliti selama pembuatan penelitian ini baik dari buku, jurnal, e-book, maupun dari internet

1. Kemenhan, 2015, “ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” (Jakarta;Kemenhan) Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Dalam The Journal Of Interdisciplinary History, 2016, Vol. 18, No. 4, The Origin And Prevention Of Major Wars (Spring, 1988), Kenneth N. Waltz , The Origins Of War In Neorealist Theory, Mit Press. Hlm. 617-618 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. Hlm. 619-620 [↑](#footnote-ref-4)
4. [Http://Indonesia.Go.Id/?Page\_Id=479](http://indonesia.go.id/?page_id=479) Diakses Pada 27 November 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. Http://Www.Setneg.Go.Id/Index.Php?Option=Com\_Content&Task=View&Id=9550&Itemid 27 November 2016 [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat Https://Www.Kemhan.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2016/05/Maretapril-2016.Pdf Hlm. 7 [↑](#footnote-ref-7)
7. V.J.H. Houben, H.M.J. Maier And W. Van Der Molen, Looking In Odd Mirror: The Java Sea (Leaden: Vakgroep Talen, 1992) Hlm Viii. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019 [↑](#footnote-ref-9)
9. Jurnal Konsep Doktrin Maritim Dan Strategi Militer Maritim Indonesiaoleh: Letkol Laut (P) Salim, S.E. Kasubdit Kerjasama, Pusat Pengkajian Maritim Seskoal [↑](#footnote-ref-10)
10. Http://Www.Fkpmaritim.Org/Pokok-Pokok-Pikiran-Dalam-Menyusun-Strategi-Maritim-Di-Indonesia/ Diakses Pada 10 January 2017 [↑](#footnote-ref-11)
11. Lihat Informasi Apbn 2016 Direktorat Jenderal Anggaran Hlm. 20 [↑](#footnote-ref-12)
12. Lebih Lanjut Lihat Http://Setkab.Go.Id/Inilah-10-Kl-Dengan-Alokasi-Anggaran-Terbesar-Dalam-Rapbn-Tahun-2016/ Diakses Pada 11 January 2017 [↑](#footnote-ref-13)
13. Http://Www.Fkpmaritim.Org/Optimalkah-Postur-Tni-Mengamankan-Poros-Maritim-Dunia/ Diakses Pada 19 January 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. Jurnal, Semmy Tyar Armandha, “Dromologi Krida Yudha: Sebuah Analisis Percepatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Dalam Target Pemenuhan *Minimum Essential Force* Indonesia 2024” Hlm 3 [↑](#footnote-ref-15)
15. Loc.Cit, “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-16)
16. Hal Ini Dituliskan Oleh Dr Henry Xu Ke Dalam The Indonesian New Maritim Security Proposal

    Yang Dimuat Di Maritim Monitor. 2007. Hal 13-14 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid. Hlm 102 [↑](#footnote-ref-18)
18. The Military Balance: East Asia And Australasia 2006. Hal 389 [↑](#footnote-ref-19)
19. Loc.Cit, Semmy Tyar Armandha, Hlm 3 [↑](#footnote-ref-20)
20. Lihat https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/31/PDF/N0460231.pdf?OpenElement [↑](#footnote-ref-21)
21. Loc .Cit “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” Hlm. 26 [↑](#footnote-ref-22)
22. Loc.Cit, “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-23)
23. Paul R. Viotti Dan Mark Kauppi. 1993. International Realtions Theory. (New York:Macmillan Publishing Company). [↑](#footnote-ref-24)
24. Lihat Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global Dalam Teori Dan Praktik. (Yogyakarta: Graha Ilmu). Hlm. 137 [↑](#footnote-ref-25)
25. Lihat Christian Reus-Smit. 2005. Theories Of International Relations (3rd Edition). New York: Palgrave Macmillan. Hal 190 Definisi Yang Di Kutip Telah Diterjemahkan Oleh Peneliti. [↑](#footnote-ref-26)
26. Mappa Nasrun, Indonesian Relations With The South Pacific Countries: Problrm And Prospect,

    Desertasi, Unahs: 1990, Hal. 98. [↑](#footnote-ref-27)
27. Barry Buzan, Ole Waever, Jaap De Wilde, Security: A New Framework Of Analysis, (London :

    Lynne Riener Publisher, 1998) Hal. 23. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid, Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-29)
29. Loc.Cit :”Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” Hlm. 54 [↑](#footnote-ref-30)
30. Endah Murniningtyas, 2016 , “Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menuju Terwujudnya Indonesia Sebagai Poros Maritim” (Jakarta:Bappenas) Hlm 1 [↑](#footnote-ref-31)
31. Martin Jones, Rhys Jones And Michael Woods, 2004 An Introduction To Political Geography Space, Place And Politics (Newyork: Routledge) Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibid [↑](#footnote-ref-33)
33. Loc. Cit Bernhard Limbong, Hlm. 20 [↑](#footnote-ref-34)
34. Mochtar Mas’oed, 1989, Disiplin Dan Metodologi , Jakarta: Lp3es , Hal 136 [↑](#footnote-ref-35)
35. Alfred Thayer Mahan ,1890, The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783 (12th Edition), (Boston: Little, Brown And Company) Hlm. 41 Di Terjemahkan Peneliti [↑](#footnote-ref-36)
36. Loc.Cit :”Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-37)
37. Adam Roberts, 1986, Nations In Arms The Theory And Practice Of Territorial Defence,Newyork. Hlm 34 [↑](#footnote-ref-38)
38. Loc.Cit Semmy Tyar Armandha. Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-39)
39. Clark G. Reynolds. 1958. Command Of The Sea: The History And Strategy Or Maritim Empires.

    Hal 32 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ibid [↑](#footnote-ref-41)
41. Op.Cip. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 [↑](#footnote-ref-42)
42. Dyah Estu Kurniawati , PENDEKATAN INTERMESTIK DALAM PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN: SEBUAH REVIEW METODOLOGIS. Dapat di akses di [↑](#footnote-ref-43)